

## **Faktor-Faktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Ubi Jalar**

**Oleh:**

**<sup>1</sup> Alexander Phuk Tjilen; <sup>2</sup> Fitriani; <sup>3</sup>Inez Cara Alexander Phoek**

**<sup>1, 2</sup>. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Musamus Merauke, Indonesia**

**<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Saint Theresa Merauke, Indonesia**

Email. [alexander@unmus.ac.id](mailto:alexander@unmus.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat petani memiliki urgensi dalam pengelolaan ketahanan pangan, karena petani merupakan produsen dan konsumen pangan terbesar serta sesuai dengan rencana pemerintah menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan petani ubi jalar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Miring. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif eksploratif dan korelasional. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dari informan kunci. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal mengandung informasi aksesibilitas yang belum optimal akibat keterbatasan kemampuan kelompok tani, dan belum adanya partisipasi pemerintah untuk menyediakan tenaga yang handal dalam menjembatani petani dengan menggunakan sumber informasi terkini, baik teknologi pengolahan lahan, pemupukan, pemilihan benih, dan panen pasca teknologi. Temuan faktor internal yang menjelaskan pendidikan, kemampuan membaca dan menulis yang mempengaruhi kemampuan manajemen keuangan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, terkait dengan keterbatasan lahan dan modal. Implikasi sosial, intervensi dari pemerintah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke diperlukan untuk membantu teknologi dan fasilitas pertanian yang mereka butuhkan, seperti traktor tangan, irigasi dan pupuk.

**Kata Kunci: Pemberdayaan; Masyarakat.; Ubi Jalar**

### **abstrac**

*Research on empowering farming communities has urgency in managing food security, because farmers are the largest producers and consumers of food and in accordance with the government's plan to make Merauke Regency a national food barn. The purpose of the study was to find out how the factors that influence the empowerment of sweet potato farmers in increasing people's income in Tanah Miring Regency. The research method used is qualitative research with exploratory and correlational descriptive analysis. Data obtained through interviews, observations from key informants. The results of the study show that external factors contain accessibility information that is not optimal due to the limited ability of farmer groups, and the absence of government participation to provide reliable personnel in bridging farmers by using the latest sources of information, both land management technology, fertilization, seed selection, and post-harvest harvesting. technology. The findings of internal factors that explain education, reading and writing skills that affect financial management skills, marketing, technology utilization, are related to limited land and capital. Social implications, intervention from the government, the Department of Food Crops and Horticulture of Merauke Regency is needed to assist the technology and agricultural facilities they need, such as hand tractors, irrigation and fertilizers.*

**Keywords: Empowerment; Public.; Sweet potato**

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan upaya kelompok masyarakat dan Pemerintah agar setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya, sesuai dengan pekerjaannya. Singkatnya, pemberdayaan adalah suatu proses perubahan yang dimaksudkan agar individu atau kelompok memperoleh kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan kehidupannya (World Bank, 2011).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan individu dan komunitas yang mandiri, sejahtera dan bermartabat dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan lingkungannya (Jamasy, 2004). Konsep pemberdayaan masyarakat (Tohidi & Jabbari, 2012) merupakan satu kesatuan konsep pembangunan manusia dan konsep pengembangan sumber daya manusia, dalam konteks makro merupakan keseluruhan proses perluasan spektrum pilihan untuk meningkatkan kapabilitas manusia dalam pembangunan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan dan gizi, perluasan kesempatan kerja, lingkungan yang sehat dan kehidupan politik (Phuk Tjilen et al., 2016) (Cara dkk., 2019). Aspek pemberdayaan meliputi aspek sarana dan prasarana, aspek ekonomi, dan pendapatan, aspek kelembagaan dengan tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk organisasi atau kelompok, kekuatan kerjasama, kekuatan komitmen bersama dan kekuatan intelektual (Sumardjo et al., 2014), yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan usahatani yang lebih baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, berupa konsolidasi dan ketersediaan jaminan luas tanah. Salah satu program pemerintah adalah revitalisasi sektor pertanian (Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, atau RPPK). Ini menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan petani. Memperhatikan tujuan undang-undang ini merupakan tugas yang berat bagi pemerintah; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempersiapkan berbagai upaya untuk membantu para petani.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan segala langkah perlindungan bagi petani dan kelompok tani, dalam menghadapi permasalahan untuk memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha berupa risiko harga, gagal panen, praktek ekonomi biaya tinggi, serta perubahan iklim pertanian, akses mudah ke teknologi dan informasi. Tujuan perlindungan bagi petani dan kelompok tani (Olounlade dkk., 2020), (Kelemen et al., 2012) adalah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan petani, termasuk perlindungan dari kegagalan panen dan fluktuasi harga pasar, serta penyediaan infrastruktur, fasilitas pertanian untuk mengembangkan usaha tani termasuk mengembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian untuk melayani kepentingan bisnis pertanian.

Pemberdayaan petani merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dengan mengelola potensi kekayaan alam yang ada di daerahnya. Sesuai dengan kebijakan dan dicanangkannya program pembuatan lumbung pangan nasional berbasis potensi alam Kabupaten Merauke (WWF, 2015), dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat petani di

masing-masing desa. Hubertus Oja (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan kelompok tani merupakan upaya untuk mengubah cara berpikir petani guna meningkatkan pendapatan usaha usahatani dalam meningkatkan kemampuan kelompok tani dan mencapai efisiensi usaha.

Upaya pemberdayaan masyarakat (Damayanti & Syarifuddin, 2020) tidak terlepas dari pembangunan desa partisipatif dan berkelanjutan dalam upaya mensinergikan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 Tahun 2019) yang merupakan pengembangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) merupakan salah satu penggerak proses pengelolaan partisipatif pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang dalam menjalankan fungsinya akan berkoordinasi dengan aktor lain, seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau lembaga sosial lainnya, tokoh masyarakat dan lain-lain.

Kabupaten Merauke memiliki potensi sebagai penghasil pangan nasional yang memadai dengan luas lahan pertanian pada tahun 2018 mencapai 56.000 hektar (Sutiawan, 2018), sebagai penghasil utama padi dari tanaman padi, selain juga ubi kayu dan tanaman pangan pertanian lainnya, jika dilihat dari topografi dan kontur Kondisi alam dan potensi kesuburan lahan di wilayah Kabupaten Merauke, komoditas ubi jalar juga sangat potensial untuk dipromosikan menjadi produk unggulan daerah di masa mendatang. Kabupaten Merauke dikenal sebagai salah satu penghasil utama ubi jalar di Provinsi Papua yang memiliki kedudukan dan status yang sangat strategis, baik dari segi luas lahan maupun kesuburan tanah sudah dipastikan Kabupaten Merauke dapat menjadi lumbung pangan nasional.

Potensi ubi jalar di Kabupaten Merauke (Nugroho, 2017) tersebar relatif merata di seluruh wilayah. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Merauke, hanya 4 kecamatan yang belum memiliki lahan budidaya ubi jalar, yaitu Kecamatan Tubang, Ngguti, Kaptel, dan Muting. Sedangkan untuk kabupaten dengan luas tanam dan luas panen tertinggi, masing-masing Kabupaten Tanah Miring (142 ha) adalah Kecamatan Jagebob (90 ha), Sota (38 ha), Waan (27 ha), dan Malind (22 ha).

Hasil survey awal, di Kabupaten Tanah Miring untuk setiap hektar lahan pertanian dapat menghasilkan 100 karung ubi jalar dengan harga jual sekitar Rp. 200.000 - Rp. 250.000 harus sejahtera, namun kenyataannya masih banyak petani di Kabupaten Tanah Miring yang mengalami kendala dalam kegiatan bertani. Kendala umum yang dihadapi petani ubi jalar di Kabupaten Tanah Miring adalah; a.) kurangnya informasi tentang teknik pertanian, b.) kurangnya modal sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggarap lahan. c.) harga jual yang masih tidak teratur. Beberapa permasalahan di atas sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat sehingga masyarakat perlu diberdayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor (eksternal dan internal) yang mempengaruhi pemberdayaan petani ubi jalar dalam meningkatkan pertanian di Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif eksploratif dan korelasional digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dari informan kunci Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke, penyuluh lapangan, ketua kelompok tani dan pemangku kepentingan yang terlibat. Wawancara terstruktur dan persepsi serta aspirasi diperoleh dari informan Kelompok Tani, Perangkat Kecamatan Tanah Miring, Petugas Kecamatan Tanah Miring, Penyuluh Pertanian. Informasi tambahan diperoleh dari tokoh masyarakat, pemuka agama dan kader yang dipilih secara acak berdasarkan latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Pemilihan lokasi ini, dikarenakan kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten ini masih minim, sedangkan potensi alam tanaman pangan sangat memadai, dengan fokus penelitian pada faktor-faktor diantaranya faktor eksternal; terdiri dari aksesibilitas informasi, kapasitas dan partisipasi organisasi lokal; dan faktor internal yang terdiri dari luas lahan, pendidikan, pemasaran dan permodalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Eksternal**

#### **a. Aksesibilitas Informasi**

Aksesibilitas informasi(Bouttes dkk.,2019) memiliki peran yang sangat penting bagi petani untuk membuka wawasan dan cara berpikir petani terhadap segala aktivitas usahatani yang dihadapi sehingga petani dapat menyesuaikan, memperbaiki, atau mengikuti cara baru, bahkan mengubah semua aktivitas usahatani yang dilakukan. Beberapa informasi yang diperoleh petani akan berpengaruh pada pola pikir petani sehingga petani dapat termotivasi, dan mendapatkan hasil yang optimal(Ren et al., 2019). Semakin banyak informasi yang didapat maka semakin baik pula petani dalam melakukan kegiatan usahatani akan semakin dinamis baik berupa usaha yang diperbaiki maupun disesuaikan dengan banyaknya informasi yang didapat atau bahkan petani akan merubah usahatani yang telah dijalankan dengan bentuk baru pertanian (Subagio, 2008)(Morris et al., 2017). Ketersediaan sumber informasi akan membantu petani memperoleh informasi yang akurat dalam mengembangkan pertaniannya tanpa harus bersentuhan langsung dengan penyuluh pertanian (Mardikanto, 2010).

Indikator akses petani terhadap sumber informasi dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan petani dalam mengakses informasi pertanian melalui kontak personal atau melalui media massa dari berbagai sumber informasi.(Kaloxyllos et al., 2012). Indikator kemampuan petani terdiri dari: (1) memperoleh informasi, (2) memanfaatkan informasi, (3) menyeleksi informasi, (4) jumlah informasi terkini, (5) frekuensi informasi dari kelompok tani tentang kegiatan pelatihan atau penyuluhan, dan (6) biaya memperoleh informasi yang lebih murah (Kuntoro, 2016).

Memperhatikan hasil penelitian masyarakat pertanian pedesaan di Pakistan, sumber utama informasi pertanian bagi masyarakat yang berkaitan dengan teknologi pertanian adalah tetangga dan pengalaman mereka sendiri dianggap sebagai sumber informasi dengan kontribusi besar di sumber utama informasi pertanian. Sumber informasi juga diperoleh dari internet atau penyedia pupuk swasta (Yaseen et al., 2016).

Berdasarkan hasil pembahasan tentang akses informasi, diketahui bahwa pada umumnya petani di Kabupaten Tanah Miring yang masih mengandalkan kemampuan dan pengalaman orang tua sebelumnya karena bertani merupakan kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang. saat ini. Kenyataannya, meskipun informasi telah terbuka luas, akses informasi juga dapat diperoleh dari sumber internet online (Panduan, 2013), yang sudah banyak tersedia, saling berbagi informasi tentang penyuluhan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang pemupukan dan pembibitan, namun masih banyak juga masyarakat yang belum mendekati tanaman pangan, atau memanfaatkan penyuluhan yang sudah ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa petani kesulitan dalam memilih informasi mana yang akan digunakan, karena petani percaya bahwa jika telah melihat uji coba informasi tersebut, hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diterima masyarakat, dan mereka menunggu bantuan. / fasilitas dari Dinas Tanaman Pangan hingga penyelenggaraan informasi atau teknologi baru.

### **b. Kapasitas Organisasi Lokal**

Pemberdayaan kelembagaan petani meliputi (Rachim et al., 2017), upaya mentransformasikan dan memfasilitasi petani tradisional menjadi petani modern yang berorientasi agribisnis, dan upaya menjadikan petani mandiri, dalam kelembagaan melalui instrumen pemberdayaan kelompok tani. Dalam mengembangkan instrumen pemberdayaan kelompok tani yang perlu diperhatikan, konflik kepentingan antar kelompok tani, kepemimpinan dari pimpinan dan kemampuan manajerial, komitmen petani untuk membentuk kelompok tani dan rasa saling percaya antar anggota kelompoktani.

Kapasitas organisasi lokal yang lebih dikenal dengan kelompok tani memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan sosial ekonomi petani; aksesibilitas ke informasi pertanian; adopsi inovasi pertanian; aksesibilitas ke modal dan pasar dan infrastruktur(Mariyono, 2019). Pentingnya kelompok tani dalam pengelolaan pertanian seperti pemanfaatan sistem irigasi secara optimal, mengatasi hambatan kelembagaan, memungkinkan penerapan sumber daya, permodalan, dan pengelolaan ekosistem ditekankan (Desiana, 2017), keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfasilitasi dan memperkuat petani (Anantanyu, 2011). Adanya kelompok tani akan memudahkan petani di suatu daerah untuk bernegosiasi, baik dalam teknis pertanian, akses permodalan, maupun bantuan investasi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani tersebut. Kesulitan dan kendala masyarakat tani dapat didiskusikan dalam kelompok tani dan kelompok tani harus memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah.(Mustapit dkk., 2019). Kelompok tani mempunyai fungsi umum antara lain 1) memberikan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan usahatani, teknologi tepat guna, dan informasi pertanian yang dibutuhkan; 2) pendampingan transportasi, pemilahan, pendistribusian dan pemasaran ubi jalar; 3) menyediakan fasilitas produksi; 4) mengatur penyimpanan produk dan 5) sebagai sarana aliran dana dari perusahaan dan bank. Kelompok tani kemudian mewakili petani dalam menjual produk ubi jalar ke perusahaan sehingga posisi petani lebih kuat dalam menentukan harga.

Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat adalah masyarakat masih mengandalkan pengetahuan tentang kemampuan bertani dari pengalamannya dan belum memiliki akses untuk menampung aspirasinya. Salah satu permintaan masyarakat adalah agar Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) lebih aktif dan lebih memperhatikan masyarakat agar dapat lebih dekat dengan PPL dan dapat bertukar informasi seperti menanyakan informasi tentang pemberdayaan, karena PPL merupakan sumber informasi bagi masyarakat dan juga dijamin memiliki informasi tentang pemberdayaan masyarakat petani untuk menambah pendapatan.

### **c. Partisipasi**

Pemberdayaan masyarakat tani akan berkembang apabila ada partisipasi aktif dari partisipasi petani secara individu maupun kelompok, untuk secara sadar dan bertanggung jawab terlibat dalam kelompok masyarakat tani, guna mencapai tujuan bersama di bidang usaha pertanian.(Alexander Phuk Tjilen dkk., 2019). Partisipasi masyarakat berperan sebagai penghubung antara praktek-praktek yang telah dilakukan oleh petani dengan iptek pertanian yang berkembang sesuai kebutuhan kelompok tani.(Zhang et al., 2016). Dalam pelaksanaannya, partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan juga diperlukan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7/2001 dalam pelaksanaannya bersama dengan para aktor lainnya, seperti Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). ) atau lembaga sosial lainnya, Tokoh / tokoh masyarakat dan lain-lain. Kepesertaan menurut (Suswadi, 2018) menyatakan jenis kepesertaannya meliputi: (a) Pekerja; (b) Pikiran; (c) Pikiran dan energi; (d) Keahlian; (e) Barang dan uang. Tahapan partisipasi dapat dijelaskan dapat terjadi dalam 4 (empat) tahap, yaitu: (1) tahap perencanaan; (2) tahap implementasi; (3) Tahap pemanfaatan hasil; (4) tahap evaluasi(Phuk Tjilen et al., 2016).

Partisipasi petani ubi jalar di Kabupaten Tanah Miring belum berkembang dengan baik karena belum adanya ketua kelompok tani yang dapat menjadi panutan, serta rendahnya keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan interaktif dan eksternal internal seluruh anggota kelompok. Tingkat partisipasi pemangku kepentingan masih rendah, hal ini terlihat dari (1) tingkat pertemuan kelompok, (2) belum ada peningkatan produksi usahatani, (3) belum adanya rencana kerja dari kelompok tani. (4) struktur pengurus kelompok tani yang belum melibatkan stakeholders.

Petani di Kecamatan Cilimus kesempatan untuk berpartisipasi tidak merata karena sebagian petani belum mengetahui adanya program KSK Agropolitan ubi jalar, dan petani tidak beredia menjadi anggota ataupun ketua dalam kelompok tani. Masyarakat sudah mampu dan ada kemauan untuk berpartisipasi didasari oleh faktor petani memahami manfaat dari ubi jalar. Petani pernah berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Tingkat partisipasi masyarakat yaitu berada pada partisipasi mandiri, hal ini berarti petani dalam bertani ubi jalar tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Untuk meningkatkan partisipasi, petani meningkatkan komunikasi dengan pemerintah, petani bergabung dengan kelompok tani agar memiliki sarana untuk mengikuti pelatihan dalam penanaman maupun pemanenan ubi jalar (Laila Dwi Purnamasari, 2019)

## **Faktor Internal**

### **a. pendidikan**

Tingkat pendidikan petani berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam mengelola usahatannya, karena sebagian besar kelompok tani yang berpendidikan rendah yaitu hanya setingkat SD dan SMP, akan kurang semangat dalam mencari informasi pertanian (Nur Jaya, 2017), apabila sebagian besar petani pada jenjang pendidikan formal dan nonformal maka kelompok tani akan kurang mendapatkan informasi yang akan mempengaruhi kemampuan mengelola informasi. Secara umum tingkat pendidikan di bidang pertanian akan mempengaruhi pola pikir mereka, terutama dalam menerima informasi untuk mengaplikasikan inovasi dan teknologi(Paltasingh & Goyari, 2018).

Kemampuan petani yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya akan lebih cepat beradaptasi dan memperoleh serta menerapkan inovasi yang bermanfaat (Darise, 2015). Terkait peran pendidikan petani dan perluasan efisiensi pertanian, Dabukke (2014) menjelaskan perlunya mengantisipasi dan merespon dampak melalui beberapa strategi seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan jaringan teknologi, peningkatan inovasi dan pengetahuan yang terintegrasi. , dan penguatan koordinasi antar stakeholder pembangunan pertanian. Sebaliknya, Lopez dan Valdes (2000) menyimpulkan bahwa pengembalian pendidikan di bidang pertanian dalam banyak kasus sangat kecil dan kontribusi utama pendidikan di pedesaan tampaknya untuk mempersiapkan generasi muda untuk beremigrasi ke perkotaan, hal ini di sejalan dengan fenomena anak muda di Indonesia,(Pratiwi & Suzuki, 2017).

Hasil studi (Carr, 2018) yang menyamakan pendidikan dengan tahun sekolah atau literasi menemukan bahwa tidak ada hubungan linier positif antara pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik di Asia. Studi ini menggunakan literasi dan registrasi pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi sebagai indikator pendidikan, dengan melihat peran pendidikan dalam pemberdayaan dan intervensi yang melibatkan pendidikan.

Hasil penelitian menjelaskan, pendidikan petani dapat dikatakan sebagai faktor pendukung kegiatan program pemberdayaan. Tingkat pendidikan petani akan mempengaruhi cara berpikir dan adaptasi petani terhadap perubahan lingkungan(Idawati dkk., 2019). Keterampilan dasar membaca, menulis dan berhitung yang umumnya diperoleh di pendidikan formal sangat diperlukan dalam pengelolaan usaha pertanian yang baik di sektor pertanian, namun dalam teknik pengelolaan lahan pertanian lebih banyak pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait atau penyuluh lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa masyarakat petani di Kabupaten Tanah Miring pada umumnya berpendidikan Sekolah Dasar, hal ini tidak terlalu mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan masyarakat tentang program pemberdayaan. Pemberdayaan ini bertujuan (Alexander Phuk Tjilen dkk., 2018) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani, salah satu motivasi petani untuk memanfaatkan ilmu yang diberikan secara intensif agar tujuan dapat tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani.

### **b. Luas lahan**

Faktor penting dalam peningkatan produksi ubi jalar adalah luas lahan karena terdapat hubungan antara produksi dan luas lahan (Suciantini, 2015) sebagai input produksi yang mempunyai keterkaitan antara faktor produksi yang disebut sebagai input dengan hasil produksi. disebut input faktor, output yang tersedia. Luas tanah sangat berpengaruh karena sangat menentukan hasil produksi yang akan dipanen sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Paltasingh & Goyari, 2018). Meskipun luas lahan ini masih menjadi patokan jumlah panen yang bisa dihasilkan, namun jika irigasi dan teknologi pertanian (pupuk, perawatan dan benih) lebih memadai tersedia, diharapkan hasil yang didapat tidak lagi berbasis. tidak hanya berdasarkan luas lahan (Maat, 2008), yang menentukan keberhasilan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ciri utama faktor produksi dari petani di Indonesia yaitu rata-rata luas lahan kurang dari 0,5 Ha, bahkan banyak petani yang hanya menjadi buruh pengolahan karena tidak memiliki lahan sendiri, sehingga petani memiliki posisi yang lemah dalam memperoleh lahan. sarana dan prasarana produksi, pembiayaan, dan akses pasar dari pemerintah atau lembaga keuangan (Rachim et al., 2017). Luas lahan yang digunakan petani untuk menanam ubi jalar di Kabupaten Tanah Miring rata-rata seluas 2 hektar yang digunakan untuk budidaya ubi jalar yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat petani.

Dalam upaya pemberdayaan petani selain luas lahan, petani juga terkena risiko perubahan iklim, dan bencana alam seperti banjir dan kekeringan (Hallegatte dkk., 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk melindungi dan memberdayakan petani. Upaya pemerintah melindungi dan memberdayakan petani belum didukung oleh undang-undang yang komprehensif dan sistematis, sehingga pelaksanaan undang-undang yang ada masih bersifat parsial dan tidak meragukan jika pemerintah daerah atau instansi yang belum memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang jelas, tegas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sambil tetap menunggu peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan undang-undang tersebut.

### **c. Pemasaran**

Pemasaran merupakan strategi dalam merencanakan untuk menjangkau pelanggan potensial dan mengubahnya menjadi pelanggan produk atau layanan yang berisi pesan merek utama, data demografis dari pelanggan sasaran sehingga mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui proses pertukaran. Peningkatan pendapatan tidak lepas dari adanya pemasaran yang baik. Pemasaran ini sangat penting bagi masyarakat petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Penerapan strategi pemasaran yang paling sering digunakan adalah strategi pemasaran yang secara umum dikenal dengan price, product, place and promotion (Kotler, 2011), dimana dengan strategi ini tidak hanya didasarkan pada produk awal ubi jalar saja, tetapi ubi jalar memiliki telah diproses.

Peningkatan penjualan dapat diperoleh dengan melakukan diversifikasi produk olahan ubi jalar baik bahan dasar, produk antara maupun produk jadi kemudian dapat langsung dipasarkan menjadi produk pangan siap makan. Produk ubi jalar dengan teknologi sederhana dapat diolah menjadi saus, selai dan keripik yang bisa dijual langsung menjadi produk makanan dan makanan ringan. Produk setengah jadi atau

setengah jadi adalah tepung ubi jalar, butiran instan, dan pati. Upaya pengolahan produksi ubi jalar ini untuk mengatasi masa panen yang melimpah dengan harapan seluruh hasil panennya dapat terserap pasar (Oke & Workneh, 2013).

Dalam rangka pengembangan pemasaran komoditas ubi jalar di Merauke, perlu adanya penguatan kelembagaan kelompok tani. Petani dapat menjual ubi jalar ke perusahaan melalui kelompok tani / gabungan kelompok tani / koperasi(Kadaja & Tooming, 2004). Beberapa informan mengatakan untuk pemasaran hasil ubi jalar, petani memasarkan hasil panennya sendiri ke pasar-pasar di kota. Petani Ubi Jalar Kabupaten Tanah Miring menjual sendiri ke kota, ada pula yang langsung menjualnya ke pengepul di Kabupaten Tanah Miring, hal ini dapat menekan biaya transportasi dan lain-lain walaupun harga satu tidak sama dengan menjualnya sendiri ke pasar di kota. Hal lainnya adalah produksi ubi jalar yang dipanen secara bersama-sama dalam satu waktu sehingga pasokan melimpah di pasaran sehingga mengakibatkan jatuhnya harga yang merugikan petani.

Hasil penelitian menjelaskan tentang teknik pemasaran yang dilakukan oleh petani ubi jalar Tanah Miring yang masih menggunakan metode tradisional, dan olah masyarakat.(Alexander P Tjilen, 2019) dapat menggunakan strategi pemasaran yang ada diharapkan dapat meningkatkan harga jual dan kuantitas ubi jalar sehingga dapat diperoleh peningkatan hasil penjualan yang lebih baik.

#### **d. Modal**

Modal merupakan faktor penting dalam usahatani ubi jalar, modal dapat digunakan untuk (Asmaniadi, 2016) membeli sarana produksi dan membiayai pengelolaan usahatani. Modal dalam usaha tani adalah: (a) tanah, (b) bangunan, (c) peralatan mesin pertanian, (d) bibit tanaman, ternak, dan ikan, (e) sarana produksi, dan (f) modal kerja / uang tunai. Ketersediaan modal berpengaruh pada saat penanaman dan pengelolaan ubi jalar, karena luas lahan sangat bergantung pada modal yang akan dikeluarkan (Graeub et al., 2016).

Dari beberapa informan tentang permodalan masyarakat, masih terdapat kendala utama dalam budidaya ubi jalar, salah satunya faktor permodalan untuk membiayai tenaga kerja dan pupuk. Bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan obat-obatan hanya setahun sekali tidak cukup bagi petani (Sudrajat et al., 2015). Sehingga para petani sangat berharap kepada pemerintah daerah atau instansi terkait, dapat memberikan bantuan tidak hanya berupa pupuk dan obat-obatan tetapi juga sarana pengairan dan infrastruktur pertanian untuk pengelolaan lahan usahatani ubi jalar. Bantuan tambahan modal dalam bentuk modal kerja yang saat ini masih terkendala dengan sertifikat tanah garapan milik mereka, karena luas tanah yang dikelola juga termasuk tanah tetangga atau tanah subur, maka dalam hal bantuan permodalan dari bank Petani di Kabupaten Tanah Miring masih kesulitan mendapatkan bantuan pinjaman modal dari bank.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan petani ubi jalar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke, terdiri dari (1) Faktor eksternal, yang terdiri dari partisipasi, aksesibilitas informasi dan kapasitas organisasi lokal yaitu aksesibilitas informasi, akses masyarakat yang belum merata terhadap informasi dan belum adanya partisipasi pemerintah dalam hal tersebut, ketersediaan tenaga yang

handal mengarahkan petani untuk menggunakan jalur informasi terkini baik dalam teknologi pengelolaan lahan, pemupukan, pemilihan benih, dan teknologi pasca panen. Hal ini juga terkait dengan kemampuan organisasi / kelompok tani lokal untuk melakukan lobi dengan pemerintah agar dapat memperoleh fasilitas untuk mendapatkan fasilitas aksesibilitas informasi. Kebutuhan yang mendesak adalah kebutuhan partisipasi baik dari dalam kelompok tani, maupun dari dinas tanaman pangan, dan penyuluh lapangan, (2) Faktor internal, yaitu luas lahan, pendidikan, pemasaran dan permodalan terjadi, upaya pemberdayaan petani ubi jalar di Kabupaten Tanah Miring belum berjalan secara maksimal, khusus untuk penanganan pembinaan dan pendampingan ada petani, dijelaskan bahwa masyarakat masih lebih banyak menggunakan teknologi warisan orang tua, dan masih menggunakan teknik pemasaran tradisional, dengan keterbatasan jumlah tanah dan modal, adalah milik sendiri. Pada jenjang pendidikan petani mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang berarti keterampilan membaca dan menulis yang baik akan mempengaruhi kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan dan teknik penjualan, serta adaptasi untuk menggunakan teknologi pertanian dan pemasaran yang lebih modern.

Saran dari penelitian ini berdasarkan hasil kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka memerlukan intervensi dari pemerintah, baik dari pihak dinas tanaman pangan untuk membantu teknologi pertanian maupun fasilitas yang mereka butuhkan seperti traktor tangan, pengairan dan pupuk. Apabila pendampingan sudah berjalan, maka usahatani ubi jalar yang sudah berproduksi secara otomatis secara ekonomis akan mendapat perhatian dari investor dan perbankan untuk memberikan bantuan ekonomi yang akan memudahkan petani dalam faktor ekonomi, permodalan dan teknologi industri.

## DAFTAR PUSTAKA:

- Bouttes, M., Darnhofer, I., & Martin, G. (2019). Converting to organic farming as a way to enhance adaptive capacity. *Organic Agriculture*, 9(2), 235–247. <https://doi.org/10.1007/s13165-018-0225-y>
- Cara, I., Phoek, A., & Phuk, A. (2019). *Empowerment of Indigenous People in Local Wisdom for the Use of Indigenous Forest Management*. 3(3), 32–38.
- Carr, A. M., Moses, T., & Balasubramanian, K. (2018). From Learning To Empowerment: A Study Of Smallholder Farmers In South West Uganda. <https://jl4d.org/index.php/ejl4d/article/view/124/112>
- Dabukke, Frans, B.M., & Muhammad, I. (2014). Kebijakan Pembangunan Pertanian Di Thailand, India, Dan Jepang Dengan Implikasinya Bagi Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/57507-id-kebijakan-pembangunan-pertanian-thailand.pdf> <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/agroland/article/download/8059/6391>
- Desiana, N., & Atik, A. (2017). Meningkatkan Pendapatan Melalui Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani. *The Asian Journal Of Technology Management*, 10 (1), 41-47.
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin, S. (2020). Inklusivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia. *Development in Practice*, 0 (0), 1–11. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Fitriani and A. P. Tjilen. (2019), Leadership Study of Women in Education in

- Merauke Regency. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 10(3), 1820–1825. <http://www.iaeme.com/IJMET/index.asp1820http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=3http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=3>
- Graeub, B. E., Chappell, M. J., Wittman, H., Ledermann, S., Kerr, R. B., & Gemmill-Herren, B. (2016). The State of Family Farms in the World. *World Development*, 87, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.012>
- Guide, A. T. (2013). BET 3: Can protein s100b add to current clinical guidelines in adult minor head injury? In *Emergency Medicine Journal* (Vol. 30, Issue 7). <https://doi.org/10.1136/emermed-2013-202853.3>
- Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Bangalore, M., & Beaudet, C. (2020). From Poverty to Disaster and Back: a Review of the Literature. *Economics of Disasters and Climate Change*, 4(1), 223–247. <https://doi.org/10.1007/s41885-020-00060-5>
- Hubertus Oja dan Funisia Lamalewa. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Berbasis Kelompok Usaha Tani Dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kampung Marga Mulia, Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. Volume VI No 2 November 2017
- Idawati, Fatchiya, A., & Ariyanto, D. (2019). Strategi budidaya kakao berkelanjutan dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui SEM PLS 2. *Jurnal Internasional Teknologi Inovatif dan Teknik Eksplorasi*, 9 (1), 291-297. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A4024.119119>
- Kadaja, J., & Tooming, H. (2004). Potato production model based on principle of maximum plant productivity. In *Agricultural and Forest Meteorology* (Vol. 127, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2004.08.003>
- Kaloxyllos, A., Eigenmann, R., Teye, F., Politopoulou, Z., Wolfert, S., Shranks, C., Dillinger, M., Lampropoulou, I., Antoniou, E., Pesonen, L., Nicole, H., Thomas, F., Alonistioti, N., & Kormentzas, G. (2012). Farm management systems and the Future Internet era. *Computers and Electronics in Agriculture*, 89, 130–144. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2012.09.002>
- Kelemen, E., Nguyen, G., Gomiero, T., & Kovács, E. (n.d.). *Author 's personal copy Land Use Policy Farmers ' perceptions of biodiversity: Lessons from a discourse-based deliberative valuation study*.
- Maat, H. (2008). Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. *Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures*, 1–5. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-3934-5>
- Mariyono, J. (2019). Stepping up from subsistence to commercial intensive farming to enhance welfare of farmer households in Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 6(2), 246–265. <https://doi.org/10.1002/app5.276>
- Morris, W., Henley, A., & Dowell, D. (2017). Farm diversification, entrepreneurship and technology adoption: Analysis of upland farmers in Wales. *Journal of Rural Studies*, 53, 132–143. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.05.014>
- Muhammad, N.J., Sarwoprasodjo, S., Hubeis, M., & Sugihen, B.G. (2017). Tingkat Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Usahatani Padi Di Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, 13 (2).

- Mustapit, Subekti, S., Sunartomo, A. F., & Rokhani. (2019). Achieving sustainable agriculture through enhancing agricultural extension institution. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 250(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/250/1/012011>
- Oke, M. O., & Workneh, T. S. (2013). A review on sweet potato postharvest processing and preservation technology. *African Journal of Agricultural Research*, 8(40), 4990–5003. <https://doi.org/10.5897/AJAR2013.6841>
- Olounlade, O. A., Li, G. C., Kokoye, S. E. H., Dossouhoui, F. V., Akpa, K. A. A., Anshiso, D., & Biaou, G. (2020). Impact of participation in contract farming on smallholder farmers' income and food security in rural Benin: PSM and LATE parameter combined. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12030901>
- Paltasingh, K. R., & Goyari, P. (2018). Impact of farmer education on farm productivity under varying technologies: case of paddy growers in India. *Agricultural and Food Economics*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40100-018-0101-9>
- Pasaribu, S. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Promosi Ekonomi Sirkular di Indonesia: Kebangkitan Kemitraan Agribisnis. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 24 (2), 135. <https://doi.org/10.21082/fae.v24n2.2006.135-144>
- Phuk Tjilen, A., Papilaya, F., & Cahyono, E. (2016). Implementation of the Economic Program Empowerment of Local Communities in Sota District, Merauke Sub District. *Review of Public Administration and Management*, 04(03). <https://doi.org/10.4172/2315-7844.1000195>
- Pratiwi, A., & Suzuki, A. (2017). Effects of farmers' social networks on knowledge acquisition: lessons from agricultural training in rural Indonesia. *Journal of Economic Structures*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40008-017-0069-8>
- Ren, C., Liu, S., van Grinsven, H., Reis, S., Jin, S., Liu, H., & Gu, B. (2019). The impact of farm size on agricultural sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 220, 357–367. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.151>
- Sudrajat, J., Mulyo, J. H., Hartono, S., Pertanian, J. E., Pertanian, F., Gadjah, U., Studi, P., Mada, U. G., Agribisnis, K. J., Pertanian, F., & Tanjungpura, U. (2015). Peranan social capital dalam memelihara keberlanjutan agribisnis jagung The role of social capital on nurturing of corn agribusiness sustainability. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28, 139–152.
- Tjilen, Alexander P. (2019). Article ID: IJMET\_10\_03\_184 Cite this Article Fitriani and Alexander P. Tjilen, Leadership Study of Women in Education in Merauke Regency. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, 10(3), 1820–1825. <http://www.iaeme.com/IJMET/index.asp1820http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=3http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=3>
- Tjilen, Alexander Phuk, Fitriani, Tambayong, H., Maturan, A. Y., Ririhena, S. W., & Manuhutu, F. Y. (2018). Participation in empowering women and the potential of the local community economy, a case study in Merauke Regency, Papua Province. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(167–176), 167–176.
- Tjilen, Alexander Phuk, Ririhena, S. W., & Manuhutu, F. Y. (2019). Local community

- empowerment in implementation of village fund program in district naukenjerai of merauke regency. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 10(1), 633–642.
- Tohidi, H., & Jabbari, M. M. (2012). The aspects of empowerment of human resources. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 31(2011), 829–833. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.150>
- Zhang, Y., Wang, L., & Duan, Y. (2016). Agricultural information dissemination using ICTs: A review and analysis of information dissemination models in China. *Information Processing in Agriculture*, 3(1), 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2015.11.002>
- Yaseen, M., Xu, S., Yu, W., & Hassan, S. (2016). Farmers' Access To Agricultural Information Sources: Evidences From Rural Pakistan. *Journal Of Agricultural Chemistry And Environment*. <https://doi.org/10.4236/jacen.2016.51b003>
- Zhang, Y., Wang, L., & Duan, Y. (2016). Agricultural information dissemination using ICTs: A review and analysis of information dissemination models in China. *Information Processing in Agriculture*, 3(1), 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2015.11.002>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Permendesa Pdt 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa